

# KONSEP DA'WAH POLITIK MOHAMMAD NATSIR

P-ISSN: 2085-4536 | E-ISSN: 2721-7183

Link: <https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/dakwah/article/view/63>

DOI : <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.63>

Dikirim: 25-03-2019

Direview: 05-04-2019

Diterbitkan: 14-04-2019

**SITI NUR FADLILAH**

[fadlilah@stidnatsir.ac.id](mailto:fadlilah@stidnatsir.ac.id)

STID Mohammad Natsir – Indonesia

## ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep da'wah politik Mohammad Natsir dengan menggunakan Metode Historis Deskriptif. **Metode Penelitian:** Kualitatif, **Hasil Penelitian:** Konsep Da'wah Politik M.Natsir diaplikasikan dalam satu *khittah* (garis perjuangan) melalui tiga lapangan yaitu lapangan parlementer dan perwakilan (legislatif), lapangan pemerintahan (eksekutif) dan lapangan pembinaan umat. **Di lapangan parlementer**, M.Natsir berusaha agar segala urusan-urusan yang mengenai kepentingan kehidupan umat diputuskan dan diselesaikan dengan dasar musyawarah. **Di lapangan pemerintahan** M.Natsir menyalurkan aspirasinya dalam menerapkan politik yang berdasarkan Islam, salah satunya adalah menyampaikan aspirasi umat Islam, agar Islam menjadi dasar negara. **Dalam bidang pembinaan umat**, M.Natsir bergerak melalui pendidikan, sesuai dengan rumusan sistem pendidikan nasional memperjuangkan adanya undang-undang wajib belajar bagi semua warganegara, hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa menuntut Ilmu adalah sebuah kewajiban setiap muslim dan Muslimah.

**Kata Kunci : Konsep, Da'wah, Politik**

## PENDAHULUAN

Dalam Islam konsep politik adalah sebuah konsep yang menyeluruh, komprehensif, integral serta bukan hanya masalah kekuasaan belaka. Islam memandang politik sebagai sebuah “cara” dan bukan “tujuan”. Telah ditemukan sebuah kenyataan bahwa memasuki wilayah

politik dan kekuasaan adalah sebuah jalan yang harus dilalui umat Islam, terutama melihat kerusakan sistem politik yang parah di dalamnya.<sup>1</sup>

Dalam sebuah jurnal penelitian da'wah disebutkan bahwa Da'wah Nabi saw pada periode Madinah yang masanya 10 tahun ternyata hasilnya lebih gemilang dari pada masa periode Makkah yang berlangsung 13 tahun. Adapun salah satu faktornya adalah terdapat unsur kekuatan dan kekuasaan pada masa periode da'wah Madinah, sehingga pendekatan da'wah masa Madinah pun tidak terbatas.<sup>2</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, umat Islam telah merasakan berbagai pengalaman tentang bagaimana sebuah rezim yang berkuasa mempengaruhi pesat dan berkembangnya sebuah gerakan da'wah. Pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan aktifitas gerakan da'wah, pemerintahan yang islami cenderung membuka peluang besar bagi terciptanya suasana kondusif bagi gerakan da'wah umpamanya dengan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Zakat, atau Pemberantasan Maksiat (pelacuran, minuman keras, judi,), atau pakaian muslimah dan sebagainya. Sebaliknya pemerintahan yang anti Islam akan menjadi penghalang besar bagi gerakan da'wah itu, umpamanya dengan memberlakukan "izin da'wah" bagi mubaligh tertentu, larangan berjilbab di sekolah, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu tokoh Islam di Indonesia Mohammad Natsir adalah seorang da'I yang tidak melewatkan kesempatan sekaligus tantangan da'wah di dunia politik ini dalam rangka menapak tilas jejak para Nabi untuk memerangi sifat-sifat *jabiliyah* di kursi pemerintahan. Sepertinya Mohammad Natsir sangat mengerti bahwa penerapan konsep da'wah dalam dunia politik terutama di Indonesia akan memiliki pengaruh dan dampak yang pesat terhadap keberlangsungan da'wah Islam di muka bumi ini. Dan ternyata Ia terbukti berhasil melahirkan dan mempengaruhi sebuah kebijakan-kebijakan yang tercetus dalam kursi pemerintahan dengan warna kebijakan yang bernuansa keislaman yang pekat. Kebijakan-kebijakan inilah yang memiliki dampak signifikan terhadap sedikit banyaknya perkembangan da'wah Islam yang telah mewarnai dunia perpolitikan di zamanya.

---

<sup>1</sup> Aries Hermawan, *Islam dan Kekuasaan*, dia akses di dakwatuna.com pada 12/10/18

<sup>2</sup> Zalikha, Da'wah dan Kekuasaan, dalam JURNAL AL-BAYAN VOL. 19, NO. 28, JULI – DESEMBER 2013 hal.20

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.21

Tentunya keberhasilan da'wah Mohammad Natsir dalam tatanan politik ini mengundang rasa penasaran sebagai seorang da'I untuk dapat mengetahui konsep da'wah seperti apa yang diaplikasikan M.Natsir dalam dunia politik. Dengan tujuan, agar penelitian ini dapat menginspirasi para da'I agar dapat meniru bagaimana sebuah konsep da'wah dapat diaplikasikan dalam sebuah tatanan bidang politik maupun bidang-bidang lainnya yang beragam, kemudian dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan sang da'i.

## HASIL DAN DISKUSI

### 1. Da'wah dan Politik dalam pandangan M.Natsir

Islam adalah agama da'wah. Islam tidak memusuhi, tidak menindas unsur-unsur fitrah. Islam mengakui adanya hak dan wujud jasad, nafsu, akal dan rasa dengan fungsinya masing-masing.<sup>4</sup> Islam adalah agama risalah untuk manusia keseluruhannya. Ummat Islam adalah pendukung amanah, untuk meneruskan risalah dengan da'wah baik sebagai ummat kepada ummat-ummat yang lain, ataupun perseorangan di tempat manapun mereka berada, menurut kemampuan masing-masing.<sup>5</sup>

Da'wah dalam arti yang luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan Muslimah. Da'wah dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar* adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini merupakan kewajiban fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan kewajiban yang ditetapkan oleh *risalah kitabullah* dan sunnah rasul bukan monopoli golongan yang disebut "ulama" atau "cerdik-Cendekiawan",<sup>6</sup> dalam lanjutan penjelasan dari buku M.Natsir ini

---

26 <sup>4</sup> M.Natsir, *Fiqhud Da'wah M.Natsir*, Bekasi: Sinar Media Abadi, 2017, h.

120 <sup>5</sup> M.Natsir, *Fiqhud Da'wah M.Natsir*, Bekasi: Sinar Media Abadi, 2017, h.

121 <sup>6</sup> M.Natsir, *Fiqhud Da'wah M.Natsir*, Bekasi: Sinar Media Abadi, 2017, h.

disebutkan bagaimana suatu masyarakat akan mendapat kemajuan apabila para anggotanya yang mempunyai ilmu, banyak sedikitnya, baik dunia atau *diny*, tidak bersedia mengembangkan apa yang ada pada mereka di antara sesama anggotanya<sup>7</sup>

Adapun terkait dengan sasaran da'wah M.Natsir mengutip pendapat Muhammad Abduh dari penyimpulan ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Dimana umat yang dihadapi oleh seorang pembawa da'wah dapat dibagi atas tiga golongan yakni, golongan Cerdik-Cendekiawan, golongan awam, dan golongan yang tingkat kecerdasanya diantara dua golongan ini. Namun pada kenyataannya, menghadapi orang awam selalu mudah daripada menghadapi kaum cerdik-cendekiawan. Baginya, menghadapi kaum cerdik cendekiawan memang memerlukan ilmu yang agak luas dan mendalam. Akan tetapi sering mereka ini, dengan sekedar sindiran atau karinah saja sudah dapat menangkap apa yang dimaksud; dengan sedikit pancingan dan dorongan untuk berfikir, mereka bisa merintis jalan sendiri dan akhirnya mencapai kebenaran.<sup>8</sup>

Adapun sasaran da'wah elit politik merupakan satu jenis golongan dari jenis 3 golongan di atas, Tampaknya golongan jenis elit politik ini lebih tepat adalah masuk ke dalam golongan cerdik-cendekiawan, sehingga menjadi tepat jika M.Natsir memilih Langkah da'wah yang lebih dominan di dunia politik karena merasa lebih mudah masuk ke dalamnya dibandingkan dengan dua golongan selainya, Sekaligus pada kedua golongan selain golongan cerdik-cendekiawan tidak menutup kemungkinan bahwa da'wah kepada golongan-golongan lainya juga turut dilakukan oleh M.Natsir dalam kehidupanya. Meskipun da'wah kepada elit politik tidak mudah bagi Sebagian para da'I bahkan cenderung menghindari ranah ini karena dianggap terlalu beresiko. Tapi bagi M.Natsir ranah ini menjadi sangat tepat untuknya.

Inti dari kegiatan da'wah menurut M. Natsir adalah:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid*, 179

1. Memanggil kita pada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perorangan atau persoalan berumah tangga, berjamaah- bermasyarakat, berbangsa-bersuku bangsa, bernegara, berantarnegara.
2. Memanggil kita kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah diatas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaan yakni fungsi sebagai syuhada'ala an-nas, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia.
3. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yakni menyembah Allah.<sup>9</sup>

Bagi M. Natsir, etika berda'wah merupakan suatu yang sangat penting untuk mendukung proses pencapaian tujuan da'wah Islam terutama di dunia politik. Karenanya akhlak karimah dalam da'wah bagi M. Natsir merupakan masalah penting yang tidak boleh dilupakan oleh para pelaku da'wah.

Seorang da'i harus memiliki akhlaq mulia, seorang politisi harus punya *fatsoen*<sup>10</sup> politik. Dengan akhlaq mulia, seorang da'I akan dapat meresapi isi hati umat dan mampu memberi bimbingan maksimal kepada umat. Dengan *fatsoen* politik, seorang politisi akan terhalang dari berperilaku menghalalkan segala cara.<sup>11</sup>

Dengan keyakinan bahwa politik dan da'wah tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang yang sama, bagi Natsir politik adalah pelaksanaan *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyi an al munkar*. Siapa saja yang berbuat baik harus disokong, siapa pun yang berlaku tidak baik harus dikritik. Oleh karena sokongan dan

---

<sup>9</sup> Mubasyaroh, M. Natsir Dan Pandangannya Tentang Da'wah Dalam Buku *Fiqhud Da'wah* dalam jurnal AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 153

<sup>10</sup> Ini adalah istilah bahasa belanda yang artinya etika.

<sup>11</sup> A.M. Fatwa, *100 Tahun Mohammad Natsir*, Jakarta : Republika, 2008, h.413

kritik bagi Natsir sama harganya.<sup>12</sup> Antara da'wah dan politik itu menyatu. Tidak ada pemisahan antara keduanya,<sup>13</sup> Meskipun seolah kontradiksi antara dua dunia ini namun pada dasarnya da'wah adalah menyeru, mengajak orang kepada kebaikan. Sedangkan politik cenderung lebih banyak berurusan dengan kepentingan. Pada perbenturan kepentingan, politik cenderung menarik garis batas antara kawan dan lawan, walaupun *mashur* juga adagium di dunia politik tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi.<sup>14</sup>

Meskipun Bagi kebanyakan orang, agama hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>15</sup> Namun bagi M.Natsir definisi seperti ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Akan tetapi tidak tepat bagi Islam. Karena hakikat nyata lebih dari itu. Kalau kita berda'wah, baca Qur'an dan Hadits, itu semuanya politik.<sup>16</sup> Sehingga Jika kita meminjam perkataan seorang orientalist, *HAR .Gibb*, maka dapat disimpulkan dalam satu kalimat :

*"Islam is much more than a religious system. It is a complete civilization". "Islam itu adalah lebih dari sistem" peribadatan. Ia itu adalah satu kebudayaan yang lengkap sempurna!"<sup>17</sup>*

Oleh karena itu bagi M.Natsir,

"Sebagai muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai orang berpolitik, kita tak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan."<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> *ibid*, 413,.

<sup>13</sup> Tim Tasyakur Steengah Abad Dewan Da'wah, *Pendiri dan pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, Jakarta : Penerbit Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017, h.xii

<sup>14</sup> Tim, *100 Tahun Mohammad Natsir*, Jakarta : Republika, 2008, h.413

<sup>15</sup> Raihan, *Jurnal Al-Bayan, Kepemimpinan .....*

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> M.Natsir, *Capita Selecta 2*, Jakarta: Abadi, 2008, h.221

<sup>18</sup> M.Natsir, *Capita Selecta 2*, Jakarta: Abadi, 2008, h.222

Sebagai negarawan yang berpihak pada masyarakat, ia memang dikenal sebagai tokoh Islam yang *vocal* terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itulah ia menempatkan da'wah terhadap pemerintah sebagai prioritas. Ia melakukan hal tersebut semenjak kepemimpinan Orde Lama (Soekarno) hingga pemerintahan Orde Baru (Soeharto) hingga akhir hayatnya.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan surat adz-Dzariyat ayat 56. "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*". M.Natsir mengembangkan pemikirannya dengan mengatakan:

"Seorang Islam hidup di atas dunia dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat . dunia dan akhirat ini sama sekali bagi kaum muslimin tidak mungkin dipisahkan dari ideologi mereka."<sup>20</sup>

## 2. Da'i Sebagai Politisi

Pada dasarnya politik dan da'wah, seharusnya dua-duanya merupakan aktifitas da'wah. Begitulah yang dilakukan Mohammad Natsir dalam rangka mencontoh teladan kepemimpinan ideal Rasulullah SAW. Dengan konsep M.Natsir tentang Modernisme Politik Islam menjadi korelasi seimbang antara hubungan da'wah dan politik. M.Natsir menggunakan istilah Modernisme Politik Islam sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial, dan politik Islam yang terkandung di dalam AL-Qur'an dan sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat manusia.<sup>21</sup>

Dalam term politik seperti ini maka M.Natsir mewajibkan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana da'wah Islam. Katanya, sebagai orang politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak

---

<sup>19</sup> Raihan, *Kepemimpinan Mohammad Natsir di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (1967-1993)* dalam jurnal Al-bayan vol.19, No.28, Juli-desember 2013

<sup>20</sup> M.Natsir, *Agama dan Negara*, dalam Thohir Luth *M.Natsir Da'wah dan Pemikirannya*, h.261

<sup>21</sup> Anwar Harjono, M.Natsir,,,, dalam buku Thohir Luth, h. 85

dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, dan menegakkan kemerdekaan.<sup>22</sup>

Mohammad Natsir adalah tokoh yang menapak tilas jejak kehidupan Rasulullah SAW. Jejak itu adalah seorang politisi Islam juga Da'i yang berpolitik. M.Natsir memberi perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, perhatian ini dibuktikan olehnya dengan surat-surat Nabi kepada raja-raja tersebut di dalam karya monumentalnya, yaitu *fiqhud da'wah*. Diakui atau tidak, perhatiannya ini ikut mempengaruhi sikapnya terhadap da'wah Islam.<sup>23</sup> Dan hal ini juga diaplikasikan dalam kepemimpinan M.Natsir selaku ketua Dewan Da'wah dalam rangka membendung gerakan kristenisasi di Indonesia dengan cara M.Natsir mengirimkan surat terbuka kepada Paus Yohanes Paulus II melalui Duta Besar Tahta Suci di Jakarta. Dalam surat tersebut M.Natsir bersama teman-temannya berkomentar tentang *diakonia*<sup>24</sup> sebagai berikut :

*“But we witness with concern that the progress of the Indonesian development is being hampered by the disharmony of relationship between Muslims and Cristians, caused by the abuse of diakonia and intolerant attitude of the Cristian toward the Muslims in Indonesia. This icondition should not be allowed to continue, because in national life we have to recognize the necessity of tolernce and mutual respect”<sup>25</sup>*

Dalam gerakan da'wahnya, M.Natsir mempunyai kesesuaian yang cukup dekat dengan gerakan da'wah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai kepala agama dan kepala negara pada

---

<sup>22</sup> M.Natsir, *Agama dan Politik Capita Selecta II*, Jakarta: Pustaka Pendis, 1958, h.157

<sup>23</sup> Thohir Luth, *M.Natsir Da'wah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h.80

<sup>24</sup> Adalah Penyalahgunaan pelayanan masyarakat dan sikap tidak toleran orang-orang Kristen terhadap umat Islam.

<sup>25</sup> *Letter of the People JOHN Paul II, abuse of DIAKONIA , to be suspended from Mohammad Natsir, K.H. Masykur, KH. Rusli Abd.Wahid, and Prof.Dr.H.M. Rasyidi*, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Pustaka Jakarta: 1410-1989. Terjemahan bebasnya “akan tetapi , kami mengamati dengan penuh keprihatinan, betapa kemajuan bangsa Indonesia in terganggu dengan adanya ketidakharonisan antara umat Islam dan Kristen, yang disebabkan karena penyalahgunaan *diakonia* di Indonesia dan sikap tidak toleran orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Dalam Thohir Luth, *M.Natsir...*, h. 123

periode Madinah, menggunakan kekuatan da'wah dan politik sebagai upaya untuk *amar ma'ruf nabyi munkar*, pada periode Madinah, Rasulullah telah melaksanakan da'wah dengan kekuatan politik maupun kekuatan da'wah murni. Hal yang serupa juga diikuti oleh M.Natsir dalam gerakan da'wahnya di Indonesia. M.Natsir menggunakan kekuatan-kekuatan politik dan da'wah sebagai upaya untuk *amar ma'ruf nabyi munkar*. M.Natsir sebagai ketua umum Masyumi telah menggunakan kekuatan politik untuk berda'wah *amar ma'ruf nabyi munkar*. Namun setelah Masyumi dipaksa bubar oleh Soekarno M.Natsir tetap konsisten dalam melanjutkan perjuangannya dengan semboyan "berpolitik melalui jalur da'wah".

Dalam aplikasinya ciri khas gerakan dan semboyan M.Natsir tentang "da'wah melalui jalur politik maupun berpolitik melalui jalur da'wah" yang sekaligus menunjukkan adanya korelasi M.Natsir sebagai politisi Islam maupun da'i yang berpolitik sebagai umat dan pemimpin yang konsisten mengikuti gerakan da'wah Rasulullah SAW.

Namun, pada prakteknya semboyan di atas dapat memiliki makna yang berbeda jika diinterpretasikan berbeda pula, hal ini melihat fakta di masyarakat Sebagian orang tidak memahami makna ini dapat disalahartikan menjadi "Politik untuk da'wah dan da'wah untuk politik" sehingga kata-kata ini akhirnya terkesan sedikit "negative" di masyarakat. Dengan redaksi yang berbeda, tentunya hasil interpretasi masing-masing orang menjadi berbeda, namun dalam analisa penulis redaksi yang tepat dalam merumuskan gerakan da'wah M.Natsir adalah "da'wah **melalui jalur** politik kemudian berpolitik **melalui jalur** da'wah", dalam hal ini terwujud dalam gerakan M.Natsir sebagai pemimpin Masyumi dan kemudian dilanjutkan perjuangan da'wahnya sebagai da'I yang memimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.

Dalam perbandingannya penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan alur dalam mewujudkan misi *amar ma'ruf nabi munkar* baik dalam tatanan organisasi da'wah maupun politik. Mohammad Natsir selalu konsisten terhadap apa yang beliau perjuangkan. Yakni menegakkan syariat Islam di Indonesia. Baik sebagai politisi Islam maupun sebagai da'i yang berpolitik. Menurut Yusril Ihza Mahendra, penulis disertasi tentang

Masyumi, Dewan Da'wah lahir untuk melanjutkan napas hidup da'wah. Saat mendirikan Masyumi pada 1945, Natsir memang mendedikasikan partai untuk Islam. Sehingga kata beliau meski Masyumi tidak lagi ada, Natsir tetap berda'wah.<sup>26</sup>

Dengan pernyataan tersebut membuktikan bahwasanya kegiatan M.Natsir di politik adalah dalam rangka Da'wah dan ketika Masyumi bubar, maka M.Natsir tetap berda'wah melalui Dewan Da'wah dengan tetap peduli terhadap permasalahan-permasalahan politik yang terjadi melalui kritik-kritiknya terhadap pemerintahan kala itu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa da'wah itu kewajiban. Menurut Syuhada Bahri ketika diwawancara oleh Hedi Andi Basthoni tentang Mohammad Natsir menyebutkan, bahwa menjadi dai itu wajib ain bagi setiap muslim, tapi profesi itu wajib *kifayah*. Menganalisa tentang teladan Mohammad Natsir menunjukkan bahwa menurut Syuhada;

“kalau anda menjadi dokter, mestinya anda adalah dai yang menjadi dokter. Ketika menjadi politisi maka anda adalah dai yang politisi. Kalau dai yang politisi, itu gerakannya dipandu oleh sifat kedaiannya. Kalau ada gerak politik yang bertentangan dengan agama, dia tinggalkan politik itu.”<sup>27</sup>

Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa di dalam berda'wah lewat politik dan berpolitik lewat da'wah, beliau menempatkan da'wah terhadap penguasa sebagai prioritas. Kepada penguasa, beliau selalu berda'wah dengan melakukan *sosial support*, *sosial control*, dan *control social participant*. Ke bawah beliau melakukan *attarbiyah ash-shabibah*. Karena itu, apapun yang terjadi dalam pemerintahan, beliau selalu mencermati. Yang baik beliau dukung, yang akan menghancurkan umat, dikoreksi, dan diperbaiki dengan dialog. Sedangkan ke bawah, beliau mencerdaskan umat. Untuk mencerdaskan umat, beliau mengirim dai ke daerah-daerah transmigrasi, ke suku terasing, dan lain-lain.<sup>28</sup> Inilah yang menjadi perpaduan yang seimbang jalur da'wah Mohammad Natsir sebagai politisi Islam dan Da'i yang berpolitik,

---

<sup>26</sup> Seri Buku Saku Tempo, *Natsir Politik Santun Antara Dua Rezim*, Jakarta: KPG, 2017, h. 127

<sup>27</sup> Hedi Andi Basthoni dalam wawancara bersama Syuhada Bahri, dalam buku, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, h.76

<sup>28</sup> Hedi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2002, h. 76

Mohammad Natsir selalu mencari jalan untuk memperjuangkan da'wah Islam di muka bumi.

### 3. Aplikasi Da'wah Politik M.Natsir Sebagai Ketua Umum Partai Politik Masyumi (1949-1958)

Mohammad Natsir adalah seorang birokrat, politisi, dan juga sebagai da'i ternama. Sebagai birokrat M. Natsir pernah menduduki dua jabatan penting sebagai menteri penerangan dan perdana menteri. Sebagai politisi Mohammad Natsir telah menduduki jabatan puncak Partai Islam terbesar, yaitu Masyumi, sebagai da'i ternama M. Natsir pernah menjadi wakil presiden Mukhtamar Alam Islami serta menjadi ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.

M.Natsir menjadi ketua umum partai Masyumi dari tahun 1949-1958. Sebagai partai Islam, Masyumi mencoba mewujudkan cita-cita besar berbasis ajaran Islam, Islam meletakkan dasar bagi masyarakat hidup berdasarkan *keseragaman*, bukan atas dasar siapa yang kuat menindas siapa yang lemah. Ajaran hukum Islam dijalankan dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara. Ia melahirkan ketertiban dan keadilan, yang akhirnya menjadi sendi kebahagiaan hidup umat manusia.<sup>29</sup>

Cita-cita inilah yang diperjuangkan oleh Mohammad Natsir dan diwujudkan dalam aktifitas-aktifitas Masyumi. M.Natsir mengatakan bahwa dalam mencapai cita-cita partai, kita telah menentukan suatu khittah atau garis perjuangan yang meliputi tiga lapangan yaitu lapangan parlementer dan perwakilan (legislatif), lapangan pemerintahan (eksekutif) dan lapangan pembinaan umat.<sup>30</sup>

Di lapangan parlementer dengan tegas Partai Masyumi menerangkan dalam tafsir asasnya, bahwa kita Masyumi memperjuangkan cita-cita tersebut melalui jalan yang sah, sebagaimana yang terbuka jalannya dalam NKRI yang berdasar kedaulatan rakyat melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi.

---

<sup>29</sup> Tim, *Mohammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, h. 167

<sup>30</sup> Tim, *Mohammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, h. 168

Kemauan-kemauan rakyat diwujudkan dengan pemilihan-umum dalam bentuk parlemen di pusat dan sejumlah DPRD di daerah-daerah.<sup>31</sup> Dan hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Masyumi mendominasi kursi di Parlemen. Masyumi berhasil mendapatkan 600 kursi. Kemudian di konstituante, dari 520 kursi yang diperebutkan, Masyumi berhasil meraih 119 kursi, PNI 112, NU 91, dan PKI 80 kursi.<sup>32</sup>

Sebagai partai politik M.Natsir mengerahkan segenap kekuatannya dengan aktif untuk menundukkan wakil-wakilnya dan dewan dewan perwakilan rakyat, selain itu, M,Natsir berusaha agar segala urusan-urusan yang mengenai kepentingan kehidupan umat diputuskan dan diselesaikan dengan dasar musyawarah. Dengan demikian maka ia, *menolak* tiap-tiap paham dan usaha yang hendak mengatur negara dengan jalan *kekerasan* dalam bentuk yang bagaimainapun dan dari pihak manapun datangnya.<sup>33</sup>

Adapun mengenai **lapangan pemerintahan**, Masyumi seperti juga partai-partai politik yang lain, berjuang untuk mendapat kedudukan dalam kabinet dan lain-lain aparat pemerintahan. Perjuangan ini bukanlah untuk merebut kedudukan, akan tetapi justru untuk turut melaksanakan dan mengambil tanggungjawab menjalankan eksekutif negara.<sup>34</sup> Di lapangan pemerintahan ini M.Natsir menyalurkan aspirasinya dalam menerapkan politik yang berasaskan Islam. Menurut Natsir konstituante harus bebas dari tekanan-tekanan dan saling terbuka dalam menyampaikan gagasan masing-masing. Masyumi yang sejak dulu mempunyai cita-cita politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, kemudian mengajukan usul itu secara terbuka.

“Bukan semata-mata karena umat Islam adalah golongan terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami memajukan Islam sebagai dasar negara kita. Tetapi berdasarkan kepada keyakinan kami, ajaran-ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 79

<sup>33</sup> *Ibid*, h.168

<sup>34</sup> Tim, *Mohammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, h. 169

menghargai antara berbagai golongan di dalam negara.” Terang Natsir.<sup>35</sup>

Dengan bahasa yang indah, Natsir menggambarkan keinginan umat Islam itu dengan ungkapan, “kalau pun besar tidak melanda, kalau pun tinggi malah melindungi.”

Dalam sidang konstituante, Natsir dan kawan-kawan bersikukuh menjadikan Islam sebagai dasar negara. Natsir membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang berjuang mengedepankan cara-cara damai konstitusional, meski hal itu tak mengurangi ketegasan sikapnya untuk menyatakan Islam sebagai dasar negara. Hal ini merupakan salah satu dari hal kecil yang dilakukan oleh M.Natsir dalam memimpin Masyumi.

Di **lapangan pembinaan umat** adalah menyusun tenaga umat dengan tertib dengan membangunkan peri kehidupan lahir bathin, mendidik sifat, pengertian, watak, akhlaq dan lain-lain. Lapangan ini meliputi segala golongan dalam penghidupan, baik golongan buruh, maupun golongan tani, golongan dagang dan masyarakat umum lainnya.

Dalam bidang pembinaan umat melalui pendidikan, Masyumi di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir, sesuai dengan rumusan sistem pendidikan nasional di atas, Masyumi memperjuangkan adanya undang-undang wajib belajar bagi semua warganegara, minimum mengikuti pendidikan sekolah dasar, adapun pendidikan di sekolah-sekolah agama (madrasah dan pesantren), dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.<sup>36</sup> Perjuangan mewujudkan undang-undang wajib belajar ini telah dilakukan oleh Masyumi sejak tahun 1946, tetapi baru tercapai pada masa kabinet Natsir (1950).

Selain itu, Masyumi juga merencanakan pembentukan Universitas Negeri di setiap provinsi. Pasca revolusi, program Masyumi dalam memajukan pendidikan itu sebagian dapat dilaksanakan. Program pembangunan universitas mulai dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dari Masyumi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Artawijaya, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008, h. 23

<sup>36</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. 264

<sup>37</sup> *Ibid.*, H.265

Selain itu, Masyumi menginginkan agar pendidikan agama menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah. Menurut Masyumi, pendidikan agama harus diajarkan menurut agama yang dianut oleh murid-murid yang bersangkutan. Usaha ini diperjuangkan dalam penyusunan undang-undang pendidikan nasional (1949), tetapi gagal karena mendapat tantangan dari partai PNI dan PKI.<sup>38</sup> Masyumi berargumen, karena dasar negara adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pendidikan agama wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Adapun tokoh-tokoh PNI berpendapat bahwa pendidikan agama berarti memaksakan agama kepada rakyat. Dari sini terlihat bahwa setiap nafas perjuangan Masyumi di bawah kepemimpinan Natsir senantiasa memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang di konstituante.

Program perjuangan Masyumi (1952) menyebutkan dalam bidang kebudayaan, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memajukan kebudayaan dan kesenian sepanjang tidak bertentangan “dengan asas-asas Islam”, dalam memperjuangkan status kaum wanita, Masyumi mengakui bahwa perbedaan sifat dan pembawaan antara kaum wanita dengan kaum pria juga membawa perbedaan tugas dan lapangan pekerjaan bagi mereka masing-masing.” Hal ini tentu sesuai dengan syariat agama Islam. Karena itu, sejak awal Masyumi telah memberikan peluang yang sama kepada pria dan wanita untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>39</sup>

#### 4. Pengaruh Da’wah Politik M.Natsir

Keberadaan M.Natsir dalam masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi, dan sosial.<sup>40</sup> Selama kehadirannya di Indonesia, Masyumi merupakan partai yang terlibat dalam elite pemerintahan-antara lain dengan membentuk pemerintahan atau berkoalisi dengan partai-partai lain sehingga ia turut memainkan

---

<sup>38</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Pendidikan Agama di Sekolah*, dalam Yusril, *Modernisme.....*h. 265

<sup>39</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jami’at at-i-islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999,h.269

<sup>40</sup> Thohir Luth, *M.Natsir Da’wah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 41

peranan dalam menentukan dasar politik Indonesia sekurang-kurangnya hingga menjelang tahun 1960.<sup>41</sup>

Masyumi dalam Kepemimpinan M.Natsir sekaligus sebagai ketua Partai 1949-1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Sembilan tahun M.Natsir memainkan perannya dalam Masyumi sebagai partai Islam terbesar dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai pemimpin politik Islam, M.Natsir secara maksimal telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umat Islam di Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut secara sederhana dapat dibuktikan melalui apa yang disebut Mosi Integral Natsir.<sup>42</sup>

Mosi inilah yang mengantarkan masing-masing negara bagian untuk bersatu kembali dalam Negara Kesatuan RI. Mosi ini dibicarakan lebih dahulu dalam Dewan Pimpinan Partai Masyumi, dan nilainya diakui Indonesia di masa-masa yang akan datang, sebab dengan mosi ini pulalah Indonesia menjadi satu dan kokoh.<sup>43</sup>

Persisnya, 3 April 1950, Natsir membacakan Mosi Integralnya. Inti Mosi ini adalah pengalihan RIS menjadi NKRI. Mosi Integral Natsir dan kawan-kawan diterima oleh pemerintah dengan baik. Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta menyatakan bahwa ia akan menggunakan Mosi ini untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. proses peralihan RIS menjadi NKRI berlangsung mulus dan damai, tak satu pun peluru dikeluarkan, tanpa pertumpahan darah. Sehingga tidak dapat dipungkiri, Natsir disegani, baik kawan maupun lawan. Hal itu lantaran keuletan dan sikap konsistensi yang sungguh-sungguh dipegangnya. Karenanya, Soekarno menganggap Natsir sebagai lawan politiknya yang paling berat. Tokoh utama PNI yang kristen, Arnold Mononutu, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Natsir dengan mengatakan;

---

<sup>41</sup> Yusril Ihaza Mahendra, *Modernisme.....* h.51

<sup>42</sup> Thohir Luth, *M.Natsir Da'wah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h.42

<sup>43</sup> *Ibid*, .

“Tanpa Mohammad Natsir tidak ada Kesatuan Republik Indonesia ini.”<sup>44</sup>

Pernyataan itu sekaligus memuktikan bahwa NKRI menjadi fakta yang tak terbantahkan sampai hari ini. Dimana ide Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari pokok pikiran Natsir, sehingga karena itulah, Natsir menjadi Perdana Menteri Pertama Negara Kesatuan. Kepemimpinan Mohammad Natsir berhasil menyelamatkan negeri ini dari konflik dan perpecahan. Dengan pertolongan Allah SWT lewat seorang pemimpin politik maupun da'wah Mohammad Natsir, bangsa ini kembali bersatu.

Masyumi bukan saja dianggap sebagai partai yang berpengaruh di Indonesia di zamanya, tetapi juga dirasakan pengaruhnya di negara-negara Muslim yang lain. Sebagai partai yang memegang kekuasaan pemerintahan, secara langsung atau tidak, partai itu turut memainkan peranan dalam mendukung kemerdekaan beberapa negeri Muslim, termasuk Tunisia, Aljazair, dan Malaysia. Partai itu pun aktif membantu penyelesaian berbagai konflik di negeri-negeri Muslim, termasuk persoalan Palestina, perjuangan M.Natsir yang merupakan Ketua Masyumi dalam penyelesaian palestina dilakukan melalui dua jalur; melakukan *public opinion*, dan *issue legal* melalui organisasi Islam Internasional resmi. Nama Natsir mencuat dalam tataran perjuangan Islam Internasional.<sup>45</sup>

Sehingga pada tahun 1956, berturut-turut Natsir menerima penghargaan dari pemerintah Aljazair dan Tunisia atas jasanya membantu perjuangan rakyat di kedua negara tersebut dalam melawan imperialisme. Dan kehormatan paling luhur diberikan kepada Natsir ketika pada tahun 1956 di Damaskus, Suriah, diselenggarakan *muktamar Alam Islami*, Natsir dipercaya memimpin persidangan-persidangan yang membahas agresi Israel terhadap Palestina.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hepi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008, h.70

<sup>45</sup> Hepi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2002, h.65

<sup>46</sup> Hepi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008, h. 48

Perjuangan M.Natsir terhadap Palestina diakui oleh Al-Mustasyar Abdullah Al-'Aqil, mantan wakil sekretaris Jendral Rabhithah Alam Islami di Makkah Al Mukrramah. Ia mengatakan, "Natsir sangat serius memperhatikan masalah Palestina. Ia temui tokoh, pemimpin dan dai di negara-negara Arab dan Islam untuk membangkitkan semangat membela Palestina, setelah kekalahan tahun 1967"<sup>47</sup>

Selain itu sengketa Mesir-Inggris mengenai Terusan Suez. Masyumi turut juga membantu menyelesaikan persoalan-persoalan minoritas Muslim seperti Burma, Thailand, dan Philipina. Risalah-rislah penerbitan Masyumi menjadi bahan bacaan al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Partai Istiqlal di Maroko, Jami'at at-i-Islami di Pakistan, PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dan ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia). Tokoh-tokoh PAS malahan menganggap Dr.Mohammad Natsir, Ketua Masyumi juga sebagai salah seorang "pemimpin" partai itu.<sup>48</sup>

Bahkan kematian Mohammad Natsir menjadi duka yang dahsyat bagi Perdana Menteri Jepang saat itu, Takeo Fukuda mengatakan, Natsir itu guru politiknya, ketika Natsir meninggal dia mengirim telegram yang berbunyi ;

"Berita kematian Pak Natsir bagi saya lebih dahsyat dibandingkan dengan bom Hiroshima dan Nagasaki"<sup>49</sup>

Dan yang paling spesial lagi sekaligus menjadi bukti kepemimpinan Mohammad Natsir sebagai orang yang berpengaruh di dunia da'wah internasional adalah hubungan Natsir dengan Raja Faisal, hingga sampai beliau mendapat *award* dari Raja Arab Saudi kala itu.<sup>50</sup> Saat itu Raja Faisal mengatakan, "Natsir bukan saja milik umat Islam Indonesia, tapi pemimpin dunia Islam", dimana setahun sebelumnya, anugrah yang sama

---

<sup>47</sup> Hepi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2002, h.65

<sup>48</sup> Yusril Ihza Mahendra, h. 52

<sup>49</sup> Hepi Andi Basthoni, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008, h. 82

<sup>50</sup> *Ibid.*,

diperoleh oleh Abul A'la Al-Maududi.<sup>51</sup> Bahkan Menurut Syuhada Bahri, jika ada sidang Muktamar Rabhithah Alam Islami, Mohammad Natsir selalu mendapat peran pidato utama.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan Mohammad Natsir adalah seorang da'i berkualitas internasional. Keberhasilan kepemimpinannya terlihat sebagai sosok da'i yang diperhitungkan sekaligus disegani oleh dunia internasional. Sebagai tokoh politik maupun da'wah pengaruhnya berada di level setara dengan Abul A'la Al-Maududi.

Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, dari sekian banyak tokoh Islam negeri ini, nama Natsir paling akrab di dunia internasional, khususnya di negara-negara Islam. Sosok Mohammad Natsir memiliki pesona tersendiri di kalangan tokoh dunia. Hal itu dirasakan oleh Buya Hamka, ketika berkunjung ke Timur Tengah bahkan, seperti aljazair, Maroko, Mesir, Arab Saudi mereka selalu bertanya tentang Natsir. Bagi buya Hamka yang saat itu menjabat ketua MUI ;

“Di dunia Islam namanya sejajar dengan Al-Maududi di Pakistan, Abul Hasan An-Nadhawi di India dan Sayyid Quthub di Mesir. Dia menjadi kebanggaan Alam Islami”

Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi, ulama kaliber internasional di abad ini dalam program *Ay-Syariah wal Hayat* di *Aljazeera Chanel* menyebut Natsir di antara tokoh Islam Indonesia yang mewujudkan capaian besar dalam gerakan reformasi , pembaharuan dan pembebasan umat dalam bidang moral, pemikiran, sosial, ekonomi, dan politik termasuk dengan Masyuminya. Secara khusus, Al-Qardhawi menyebut prestasi besar Natsir dalam menyelamatkan akidah umat dengan melakukan gerakan membendung kristenisasi di Indonesia melalui organisasi DDII.<sup>53</sup>

Selain dikagumi dan disegani kawan, dampak danpak keberhasilam kepemimpinan Mohammad Natsir juga diakui oleh Montegory, seorang orientalis Barat. Ia mengatakan ;

“Natsir memiliki pemikiran cemerlang dan berwawasan jauh ke depan sesuai dengan kemajuan zaman. Tak hanya

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 82

<sup>53</sup> Hapi Andi , *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008, h.45

bagi umat Islam Indonesia, tapi juga bagi kemajuan dunia Islam.”<sup>54</sup>

George Mac Turnan Kahin, seorang pakar tentang Indonesia dari Universitas Cornell pernah memberikan catatan tentang Natsir. Ia menjelaskan, Natsir telah memberikan sumbangan besar terhadap tanah airnya melalui pengaruh aliran-aliran pembaruan dalam Islam dan cara beliau dan pemimpin Islam lain berusaha untuk menjalankan konsep Islam dalam realita Masyarakat Indonesia.<sup>55</sup>

Keteladanan dan kepemimpinan Natsir telah memberikan ingatan dan kesan yang mendalam di hati mereka yang pernah berkenalan dan bekerja di bawah bimbingannya. Banyak orang-orang muda yang sekarang memegang kepemimpinan dan tanggung jawab di Negara masing-masing seperti Dato Seri Anwar Ibrahim, Dr.Khalid Ikramullah Khan, Ust. Abdul Salam Sultan dan penjurur dunia yang memperoleh bimbingan langsung maupun inspirasi dari M.Natsir keteladannya dan kepemimpinannya.<sup>56</sup>

Sehingga tidak mustahil jika ketokohan Natsir kembali mendapatkan pengakuan dunia. Ia diakui dan dipilih sebagai salah seorang dari 100 tokoh Muslim di seluruh dunia dalam sebuah buku bertajuk *100 Great Muslim Leaders of The 20 Century* yang diterbitkan oleh institute of Objektive Studies, New Delhi, 2005, sebuah jaringan Internasional Institute of Isdi India (IIIT).<sup>57</sup>

## KESIMPULAN

M.Natsir memandang politik dari sudut pandang da'wah adalah sesuatu hal yang tidak mungkin lepas dari kehidupan umat Islam, sedangkan umat Islam tidak akan pernah lepas dari Ideologi Islam. Karena antara da'wah dan politik baginya adalah seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan, Islam memiliki makna lebih dari suatu sistem peribadatan, dan semua ini menjadi berkaitan terkait tujuan penciptaan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> M.Habib Chirzin, *100 Tahun M.Natsir*, Jakarta: Penerbit Republika, 2008, h.373

<sup>57</sup> *Ibid.*,

manusia yakni untuk beribadah kepada yakni Allah tuhan semesta Alam, sebagaimana dalam surat adz-Dzariat ayat 56.

Dengan Konsep Modernisasi Politik Islam M.Natsir menganggap bahwa menegakkan Islam tidak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, dan menegakkan kemerdekaan.

Dalam aplikasi da'wah M.Natsir di Masyumi, dalam rangka mewujudkan cita-cita partai, M.Natsir telah menentukan suatu *kebittab* atau garis perjuangan yang meliputi tiga lapangan yaitu lapangan parlementer dan perwakilan (legislatif), lapangan pemerintahan (eksekutif) dan lapangan pembinaan umat.

Di lapangan parlementer, M.Natsir berusaha agar segala urusan-urusan yang mengenai kepentingan kehidupan umat diputuskan dan diselesaikan dengan dasar musyawarah. Dengan demikian maka ia, *menolak* tiap-tiap paham dan usaha yang hendak mengatur negara dengan jalan *kekerasan* dalam bentuk yang bagaimanapun dan dari pihak manapun datangnya.

Di lapangan pemerintahan M.Natsir menyalurkan aspirasinya dalam menerapkan politik yang berasaskan Islam, salah satunya adalah menyampaikan aspirasi umat Islam, agar Islam menjadi dasar negara.

Dalam bidang pembinaan umat, M.Natsir bergerak melalui pendidikan, Masyumi di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir, sesuai dengan rumusan sistem pendidikan nasional memperjuangkan adanya undang-undang wajib belajar bagi semua warganegara, hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban setiap muslim dan Muslimah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artawijaya, *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008
- Basthoni, H.A., *M.Natsir Sang Maestro Da'wah*, Jakarta: Mujtama Press, 2008
- Tim, *100 Tahun M.Natsir*, Jakarta: Penerbit Republika, 2008
- Hermawan, A. *Islam dan Kekuasaan*, dia akses di [dakwatuna.com](http://dakwatuna.com)
- Luth, Thohir. *M.Natsir Da'wah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005

- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jami'at at-i-islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Mubasyaroh, M. *Natsir Dan Pandangannya Tentang Da'wah Dalam Buku Fiqhud Da'wah* dalam jurnal AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam
- Natsir, M. *Agama dan Politik Capita Selecta II*, Jakarta: Pustaka Pendis, 1958, h.157
- Natsir, M. *Fiqhud Da'wah M.Natsir*, Bekasi: Sinar Media Abadi, 2017
- Natsir, M. *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung : Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957
- Raihan, *Kepemimpinan Mohammad Natsir di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (1967-1993)* dalam jurnal Al-bayan vol.19, No.28, Juli-desember 2013
- Seri Buku Saku Tempo, *Natsir Politik Santun Antara Dua Rezim*, Jakarta: KPG, 2017
- Tim Tasyakur Steengah Abad Dewan Da'wah, *Pendiri dan pemimpin Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, Jakarta : Penerbit Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2017
- Tim, *100 Tahun Mohammad Natsir*, Jakarta : Republika, 2008, h.413
- Tim, *Mohammad Natsir 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978
- Zalikha, *Da'wah dan Kekuasaan* : JURNAL AL-BAYAN VOL. 19, NO. 28, JULI – DESEMBER 2013